

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Israel merupakan negara yang paling dekat persahabatannya dengan Amerika Serikat. Sebab, hubungan Amerika Israel diibaratkan seperti kakak dan adik. Amerika selalu bertindak sebagai pelindung bagi Israel. Israel sebagai negara bentukannya, akan selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Meskipun kecaman yang diterima datang secara bertubi-tubi dan terus menerus sejalan dengan perkembangan konflik yang terjadi.

Fenomena politik internasional menunjukkan dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi berawal dari penyelesaian pertikaian yang ditempuh melalui cara damai dan negoisasi gagal dicapai diantara negara yang terlibat konflik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik internasional pada dasarnya bersifat anarkis. Hal ini terjadi karena memang dalam politik internasional tidak ada otoritas tunggal yang dapat memaksakan penyelesaian atas konflik yang terjadi diantara berbagai negara¹.

Konflik Israel Palestina yang sudah berlangsung sejak lama belum menandakan akan berakhir dengan damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan menjaga keamanan dunia dan masyarakat internasional ternyata tidak mampu mewujudkan terjadinya penyelesaian Konflik Israel Palestina secara damai. Berbagai upaya perdamaian

¹ M. Amien Rais, "Politik Internasional Dengan Iri, Usaha Nasional" Yogyakarta, 1989 hal 4.

telah dijalankan, tetapi hasilnya tetap sama bahkan konflik Israel Palestina semakin menjadi-jadi. Tujuan PBB tersebut seakan-akan dikaburkan oleh ketidak sanggupan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina. Pengaruh Amerika yang begitu besar merupakan faktor yang cukup penting dari ketidaksanggupan DK PBB yang bersifat memberi kutukan atau kritik kepada Israel.

Menariknya hubungan Amerika dan Israel ini menjadi alasan penulis mengambil judul tersebut diatas serta untuk mengungkap seberapa besar pengaruh Amerika- Israel di PBB sehingga solusi konflik yang diambil selalu mengalami kegagalan.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat PBB dalam upaya penyelesaian konflik Israel Palestina
2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan Amerika Serikat (AS) di PBB khususnya dalam penyelesaian konflik Israel Palestina.
3. Tujuan lain adalah untuk memperoleh derajat sarjana Hubungan Internasional

C. Latar Belakang Masalah

Istilah PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) atau *United Nation* pertama kali dipergunakan pada tanggal 1 Januari 1942, atas usul presiden Amerika F.D. Roosevelt. Namun pengertian istilah tersebut pada waktu itu berbeda dengan pengertian seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada waktu itu yang dinamakan PBB adalah tempat berkumpulnya 26 negara di Washington, kemudian bertugas mengeluarkan suatu deklarasi yang berdasarkan pada pokok-pokok Piagam Atlantik dan bertujuan untuk memobilisir semua kekuatan militer dan ekonomi untuk memenangkan perang melawan Hitlerisme Jerman, fasisme Italia dan militerisme Jepang. Jadi PBB pada waktu itu adalah bertujuan untuk memenangkan perang. Sedang PBB yang resmi dibentuk pada tahun 1945 adalah sebaliknya yaitu untuk tujuan perdamaian, bukan untuk perang. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa PBB tahun 1942 lebih merupakan koalisi peperangan. Namun demikian ternyata deklarasinya telah mampu menjangkau jauh kedepan yaitu kerjasama untuk kepentingan perdamaian dunia.

Fungsi mediator yang diemban PBB diharapkan dapat menjadi katalisator tentang arti dan fungsi lembaga internasional untuk menyelesaikan pertikaian, baik berupa perang atau konflik regional seperti yang dirumuskan PBB yang menyatakan:²

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan tindakan-tindakan kolektif dan cara-cara penyelesaian secara damai.
2. Memajukan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa.

² Allien Harlina, Dra, M.Si. "*Perserikatan Bangsa-bangsa*", dalam diklat kuliah Organisasi dan

3. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan untuk meningkatkan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan dasar kemerdekaan tanpa perbedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat dari pada keselarasan tindakan bangsa-bangsa di dalam usahanya untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan fungsi dari PBB tersebut.

Untuk mencapai tujuan itu, para anggota PBB wajib dengan sukarela untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut.

Diantara keenam organ pokok PBB, **Dewan Keamanan** merupakan organ pokok yang paling penting dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan tugas PBB demi mencapai maksud dan tujuan organisasi yaitu perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan keamanan merupakan bentuk dasar dari suatu persekutuan para pemenang perang dunia II yang merencanakan bahwa Dewan Keamanan merupakan sebuah badan tertinggi di dalam organisasi dengan tugas utama mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional. Kerjasama antar negara-negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni soviet, Inggris, Republik Tiongkok dan Perancis³, dipandang sangat penting untuk tujuan ini. Maka mereka merasa berhak mendapatkan status istimewa dalam lembaga pengambilan keputusan tersebut, yang kemudian ditetapkan dengan memberikan status sebagai

³ Pada tahun 1971 Keanggotaan Republik Tiongkok digantikan oleh Republik Rakyat Cina (RRC)

anggota tetap di Dewan Keamanan dengan memberikan hak istimewa berupa **Hak Veto** kepada kelima negara tersebut.

Sejak perang dunia ke II berakhir, PBB merupakan satu-satunya organisasi internasional yang universal dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sampai saat ini kehadiran PBB masih diwarnai oleh gejolak politik internasional seperti konflik regional di Timur Tengah yaitu konflik antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Palestina dan Israel merupakan sebagian kawasan di Timur Tengah yang terlibat konflik. Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan daerah yang diperebutkan, masing-masing pihak mengklaim bahwa daerah-daerah tersebut adalah milik mereka.

Palestina adalah perjuangan yang sangat panjang, Konflik Israel Palestina yang sudah terjadi sejak tahun 1967 belum mengizinkan pembentukan negara Palestina berdaulat.

Berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari digelarnya perundingan Oslo tahun 1993. Berdasarkan perundingan tersebut, tahun 1994 Israel menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza dan mengakhiri masa kependudukannya selama 27 tahun. Namun kesepakatan Oslo tersebut sekaligus menguak adanya segmen-segmen masyarakat Yahudi yang belum siap menerima proses perdamaian Timur Tengah. PM Israel Yitzaak Rabin yang menggagas kesepakatan Oslo itu, Akhirnya
tahun ditengah ekstremis Yahudi Vigal Amir pada November tahun 1005

kemudian digantikan oleh Benyamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap Palestina⁴.

Tahun 1996, Israel kembali menduduki jalur Gaza dan Tepi Barat, dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB no 242 yang intinya tidak dibenarkan menduduki daerah melalui peperangan serta meminta Israel menarik pasukannya dari tanah-tanah yang diduduki. Tetapi sama halnya dengan resolusi-resolusi terdahulu, Israel tidak mengindahkan resolusi tersebut.

Pada pemerintahan Benyamin Netanyahu ini, proses perdamaian mengalami kemacetan hampir selama dua tahun hingga tercapai kesepakatan *Wye River* pada Oktober 1998 yang berisi tentang pembagian wilayah bagian Israel dan Palestina dan mengecam Israel untuk menarik mundur pasukannya. Kesepakatan *Wye River* tersebut tidak dilaksanakan dan bahkan dibekukan oleh Netanyahu. Selanjutnya diadakan perundingan *Camp David* tahun 2001, tetapi perundingan tersebut juga tidak membuahkan hasil. Oktober 2001 krisis di Timur Tengah semakin memanas ditandai dengan bentrok terbuka antara penduduk sipil Palestina dengan tentara Israel dan pengrusakan terhadap kantor dan otoritas Palestina.

Untuk meredakan ketegangan di wilayah pendudukan Palestina, pada Juni 2001 diadakan kesepakatan gencatan senjata atas prakarsa AS, tetapi gencatan senjata kembali gagal dilaksanakan. Akibatnya ketegangan yang semakin memuncak tak bisa dihentikan. Aksi balas membalas terus terjadi tanpa ada pihak yang mau mengalah atau menenangkan diri.

⁴ M. d. S. Al-Balawi, "Dilema Israel: antara kebijakan politik dan perdamaian" (Kompas: 2002)

Puncak ketegangan terjadi ketika Israel dengan sangat tega membunuh pemimpin Hamas⁵ Syech Ahmad Yassin sekaligus penggantinya, Abdel Aziz Rantissi. Tindakan tak berperikemanusiaan itu mengundang kecaman dari seluruh dunia.

Sidang Umum (SU) PBB pun mengeluarkan kutukan keras kepada Israel. Namun kutukan 191 negara dan bangsa yang bergabung dalam PBB itu sama sekali tak menyentuh nurani Israel. Kemudian, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi mengutuk tindakan brutal Israel tersebut. Padahal akan lebih berarti dibandingkan dengan kutukan SU PBB. Pasalnya, resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat (*binding*), sedangkan Sidang Umum tidak mengikat (*non-binding*). Dengan kata lain, resolusi Dewan Keamanan bisa melahirkan sanksi bagi negara yang tidak mengindahkan keputusan tersebut. Sedangkan keputusan SU PBB hanyalah memiliki bobot sejauh ikatan moral.⁶

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah menyebabkan kemurkaan dunia. Seluruh dunia melihat bahwa sebagai sebuah organisasi internasional, PBB tidak lagi mewakili komunitas internasional.

Peran Dewan Keamanan dalam mengatasi konflik-konflik regional sebenarnya bisa dilihat keberhasilannya misalnya dalam penyelesaian penghentian perang Iran-Irak, perang Arab-Israel 1973, penghentian perang saudara di Korea. Tetapi keberhasilan yang dicapai hanya sebatas mengesahkan resolusi, upaya gencatan senjata. Walaupun tujuan akhir dari peran Dewan Keamanan tersebut tidak terlaksana. Dalam kasus ini, sulit untuk mengukur keberhasilan Dewan

⁵ G. J. Al-Anti, *Kelompok yang didirikan oleh pemuda-pemuda Palestina untuk menentang Israel*.

Keamanan dalam melaksanakan perannya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional, karena Dewan Keamanan PBB belum mampu menyelesaikan konflik secara tuntas. Ini dapat dilihat dari upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Konflik Israel Palestina ini merupakan ujian bagi PBB untuk memperlihatkan efektifitas PBB dalam menyelesaikan masalah internasional. Ketidaksanggupan PBB khususnya Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina menjadi perhatian utama bagi seluruh komunitas internasional atas harapan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh PBB.

Ketidak seimbangan kekuatan ditubuh PBB merupakan kelemahan yang menyebabkan kegagalan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina. Tetapi untuk saat ini PBB tetap merupakan salah satu harapan dari terciptanya perdamaian dan keamanan internasional

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji disini adalah: Faktor-faktor apa saja yang menghambat PBB dalam upaya penyelesaian konflik Israel Palestina?

E. Kerangka Pemikiran/Teori yang digunakan

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan diatas maka

diuraikan dalam bab-bab teoritik yang dikembangkan melalui konsep

1. Teori Peranan Organisasi Internasional

Peran organisasi menurut Friedrich Kratoxhwil dan John Gerard R⁷, merupakan suatu asumsi dari pendekatan lembaga formal yang telah ditinggalkan, yaitu bahwa pemerintahan internasional adalah juga merupakan organisasi internasional. Peran-peran organisasi internasional difokuskan secara nyata dan potensial serta lebih banyak menggambarkan proses dari pemerintahan internasional. Perspektif ini dibagi menjadi kelompok yang berbeda yaitu:

Kelompok pertama, menekankan pada peran organisasi internasional dalam resolusi dari permasalahan internasional yang substantif. Diplomasi *preventif* (pencegahan) dan penjagaan keamanan merupakan bagian dari peran organisasi internasional dalam wilayah perdamaian dan keamanan.

Kelompok kedua, peran perspektif organisasi difokuskan keluar dari penyelesaian masalah yang substantif dapat diatasi melalui arti kelembagaan yang sebenarnya. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari penyatuan pusat, terutama dari berbagai macam jabatan baru. Ini terpenuhi dengan kenyataan bahwa wilayah hukum kedua negara dan keberadaan organisasi internasional telah bertambah melebihi wilayah fungsional dari masalah fungsional. Organisasi internasional mencoba menyelidiki luasnya adaptasi lembaga yang pada kenyataannya dapat kondusif dalam keadaan darurat dari bentuk politik “kekuasaan di luar negara bangsa”.

⁷ Fredrich K and Edward D Mansfield, *Internasional Organization ; A Leader*, (New York : Harper Collins College, Published, 1994) hal 6

Kelompok ketiga dalam peran perspektif organisasi diawali dengan sebuah kritik dari perubahan bentuk harapan dan teori integrasi dan kemudian pergantian lebih dipusatkan dalam hal umum. Bagaimana lembaga internasional dengan sedikit pertimbangan untuk memperbesar atau mengubah gambaran, karakteristik dari sistem internasional.

Fungsi-fungsi organisasi menurut Edward D Mansfield antara lain: pertama, sebagai fungsi legitimasi. Fungsi kedua, yaitu pembentukan norma, fungsi organisasi internasional ini dimaksudkan untuk menciptakan norma-norma yang telah disetujui oleh dunia internasional. Fungsi organisasi internasional yang ketiga adalah menentukan standar kedaulatan, hak asasi manusia dan masyarakat internasional. Sedangkan menurut Friedrich K, fungsi organisasi internasional antara lain: fungsi penjaga perdamaian, fungsi mediasi, dan fungsi kebijakan umum untuk membangun dan menjaga keamanan dunia dan masyarakat internasional.

Peran PBB dalam konflik Israel-Palestina hanya sebatas pada pihak ketiga dimana, Dewan Keamanan berusaha untuk menyediakan tempat bagi Israel dan Palestina untuk bertemu dalam suatu forum dimana dalam forum tersebut dapat dicarikan jalan keluar tanpa kekerasan yaitu melalui perundingan, sehingga tercapai suatu kesepakatan damai dan diharapkan bisa mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara kedua belah pihak

Fungsi yang paling penting dari Dewan Keamanan sebagai mediator adalah memulihkan komunikasi diantara kedua belah pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik dan jika perlu

memberikan beraneka jasa kepada para pihak yang berkonflik. Peran dan tugas mediator sangat rumit dan prakarsa serta strategi perundingan yang diterima mediator sangat bervariasi. Intervensi yang dilakukan Dewan Keamanan berkisar dari meneruskan pesan diantara kedua belah pihak untuk dapat terlibat dalam perundingan dan mencoba menekankan kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk menerima usul-usul perdamaian yang telah dirumuskan Dewan keamanan sebagai mediator.

Dalam tubuh PBB terdapat 6 organ pokok yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah International, Dewan Sosial Ekonomi, Dewan Perwalian dan Sekretariat. Masing-masing organ bertanggung jawab terhadap tujuan dari organ tersebut. Penentuan negara-negara untuk kemudian ditetapkan sebagai salah satu anggota organ PBB harus benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara tersebut. Apabila terdapat kekeliruan di dalam menentukan negara yang akan ditetapkan dalam organ PBB, hal ini akan berpengaruh pada proses kerja selanjutnya di dalam menangani masalah internasional.

Seperti adanya hak istimewa berupa hak veto pada 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Apabila 5 negara pemegang veto itu tidak menggunakan haknya, maka keputusan PBB akan berjalan lancar, tetapi apabila salah satu negara pemegang veto menggunakan haknya, maka Dewan Keamanan tidak bisa mengambil keputusan.

Komposisi seperti itu, dapat menyebabkan setiap keputusan yang diambil apabila bertentangan dengan kepentingan negara pemegang hak veto

maka keputusan itu tidak dapat dijalankan. Ini berarti tidak adanya sentralisasi pengambilan keputusan. Di dalam artian, setiap keputusan yang dirumuskan oleh seluruh anggota PBB harus mendapatkan persetujuan dari ke lima anggota tetap Dewan Keamanan.

PBB sebagai badan dunia yang diharapkan berada diatas semua pihak kini telah semakin tidak berdaya mempertahankan independensinya. Sehebat apapun wewenang PBB, tidak akan bisa untuk menjalankan sebuah keputusan, termasuk resolusi. Karena pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan keputusan tetapi juga butuh sarana. Ini merupakan faktor ekstern lingkungan organisasi PBB. Dimana markas besar PBB terletak di New York, Amerika. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi manajerial PBB. Karyawan PBB sebagian besar berkebangsaan Amerika yang akan mempengaruhi kebijakan yang diambil PBB.

Faktor lain yang cukup penting dalam pencapaian efektivitas sebuah organisasi adalah perilaku dari negara anggota PBB itu sendiri. Apabila setiap negara anggota berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi maka PBB akan selalu menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Konsep *Power*

Power, menurut K. J. Holsti⁸, didefinisikan sebagai sebuah konsep multidimensional yang terdiri dari: (1) Tindakan yang dengan itu satu faktor mempengaruhi faktor lain; (2) Kemampuan yang digunakan untuk tujuan

⁸ James E. Dougherty and Robert L Pfaltzgraff, Jr, "Teori-teori hubungan Internasional",

diambil oleh M. Amin Rais, Harunata Deklar, Tahun Wamita, 1996 hal.109

mempengaruhi faktor lain; (3) Tanggapan yang didapat. Dengan Holsti mengkonsepsikan *power* sebagai *A means to an end* (sarana untuk mencapai tujuan), meskipun sebagian pemimpin politik akan mencari pengaruh sebagai tujuan itu sendiri, sebagaimana sebagian orang menghargai uang tidak karena apa yang bisa dibeli oleh uang tetapi demi uang itu sendiri. Singkatnya Holsti mendefinisikan *power* sebagai “*the general capacity of a state control the behavior of others*” (kemampuan umum suatu negara untuk mengontrol negara-negara lain). Sedangkan menurut Theodore A Coulumbis dan James H Wolfe kekuatan mempunyai tiga unsur utama, yaitu:

- a. *Unsur pertama* adalah kekuatan (*force*) yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit, misalnya aktor A menggunakan alat-alat paksa seperti militer, ekonomi, dan lain-lain terhadap aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik aktor A.
- b. *Unsur kedua* adalah pengaruh (*influence*) yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi, jenis kekuatan, oleh aktor A untuk menjaga atau mengubah perilaku aktor B dengan cara yang sesuai dengan persepsi atau keinginan aktor A.
- c. *Unsur ketiga* adalah paksaan (*authority*) yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi instruksi dan perintah yang dikeluarkan oleh aktor A, yang dipelihara dalam persepsi B mengenai aktor A.

Penggunaan suatu unsur *power* tidak selalu sama efektifnya atau sama

fungsi dalam semua situasi. Suatu negara mungkin lemah dalam suatu

situasi atau unsur tetapi kuat dalam situasi lain atau salah satu atau lebih unsur lainnya.

Kekuasaan pada umumnya diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi internasional. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer saja, tetapi juga faktor-faktor ekonomi, Politik, teknologi, psikologi, sangat penting. Dalam suatu sistem internasional yang anarki, kekuasaan relatif dari setiap negara menjadi penting dan bahkan menentukan. Negara pada dasarnya tindakan bersedia kehilangan sebagian dari kekuasaannya, apalagi kalau sebagian kekuasaan yang hilang itu memberikan keuntungan-keuntungan baginya, kecuali jika ia menerima imbalan yang dinilainya layak atau lebih menguntungkan.

Dengan demikian, dalam mendirikan dan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional perlu diperhitungkan terutama, negara-negara besar biasanya sangat enggan menyerahkan keuntungan-keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya dan berusaha agar organisasi itu dibentuk dan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin berlanjutnya keadaan yang menguntungkannya itu. Sebaliknya negara-negara yang relatif lemah dan kecil, yang secara otomatis berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan negaran-negara besar, akan berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbesar kekuasaan relatifnya dengan memanfaatkan organisasi internasionalnya itu. Dua tuntutan yang saling bertentangan itu memerlukan suatu akomodasi yang cukup adil agar organisasi internasional itu dapat berfungsi dengan efektif. Ini berarti bahwa

pengaturan-pengaturan struktural dan prosedural, terutama mengenai cara pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara kekuasaan dan kepentingan dari para anggotanya.

PBB pada dasarnya adalah ciptaan negara-negara besar yang muncul pada akhir Perang Dunia II. Oleh sebab itu, sejak semula hal ini merupakan kendala bagi PBB untuk betul-betul berperan sebagai aktor yang independen dalam politik internasional. Posisi negara-negara besar itu karena memang tanggung jawabnya yang besar atas perdamaian dunia dibanding dengan negara-negara lainnya, tercerminkan dalam veto mereka dalam Dewan Keamanan. Ini berarti bahwa PBB hanya dapat berperan secara efektif untuk mencegah atau menumpas kekerasan dalam konflik-konflik yang secara tidak langsung melibatkan negara-negara besar. Bahkan dalam hal yang sedemikianpun PBB hanya bisa bertindak jika semua negara besar sepakat, yaitu jika tidak satupun diantara mereka menggunakan hak vetonya.

Amerika tidak menjadi negara yang paling kuat di dunia jika Amerika Serikat tidak menjadi pemimpin dan tidak mempunyai alat-alat kepemimpinan. Untuk menjaga kepemimpinannya Amerika Serikat harus selalu siap mendukung diplomasinya dengan ancaman dan kredibilitasnya yang tinggi.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di dunia menganut apa yang disebut prinsip-prinsip politik modern, yaitu: *sovereignty* (kedaulatan), *the right of self determination* (hak untuk mengatur negaranya sendiri), *boundary* (perbatasan), *freedom* (kemerdekaan) dan *democracy*

(demokrasi). Prinsip-prinsip ini dipercaya dapat mencegah konflik regional yang selanjutnya dapat mencegah perang yang melibatkan banyak negara seperti halnya Perang Dunia II⁹.

Amerika Serikat, khususnya di bawah Presiden Woodrow Wilson yang sangat terkenal dengan ucapannya *make the world safe for democracy*, mendorong agar negara-negara mengikuti prinsip-prinsip politik modern tersebut guna mencegah perang. Amerika Serikat merupakan negara pelopor ditegakkan prinsip-prinsip ini, tetapi negara adikuasa ini pula yang memberi contoh pelanggaran, hal ini juga yang akhirnya menyebabkan proses demokratisasi di Timur Tengah jadi terhambat walaupun hal ini dapat dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip politik yang selama ini telah menjadi rezim (peraturan) dalam melakukan hubungan internasional yang semula sangat dihormati setelah Perang Dunia II.

Amerika menginginkan agar semua negara mengikuti konsep-konsepnya ini baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Negara yang tidak bersedia menerima akan dianggap membahayakan kepentingannya. Amerika sampai sekarang tetap memberikan dukungan kepada Israel, parlemen Amerika selalu mengatakan dan mengecam bahwa pandangan dan tindakan Perdana Menteri Israel beberapa kali merupakan hambatan bagi perdamaian Arab-Israel, akan tetapi Amerika (dalam hal ini Kongres) tetap memberikan dukungan berlebihan dan bantuan teknik untuk industri senjata,

tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga diplomasi. Dan mereka membangun gudang-gudang penyimpanan senjata di Israel¹⁰.

Tampaknya tidak akan pernah ada perdamaian selama Israel terus melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menentang resolusi-resolusi badan dunia itu. Dan sering pula Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan Israel yang melanggar resolusi-resolusi PBB, akan tetapi begitu sering pula Amerika Serikat membela dan melindungi tindakan-tindakan salah Israel tersebut.

Bahkan berulang kali dengan kekuatan veto-nya Amerika memberikan dukungan pada pemungutan-pemungutan suara PBB, bahkan pada tahun 1983 Amerika sampai mengancam akan menarik diri dari Majelis Umum jika Majelis menghukum Israel karena penolakannya untuk mematuhi resolusi-resolusi PBB.¹¹

Pada saat yang sama, Majelis Umum telah berulang kali mengecam pendudukan Israel atas tanah Arab, serangan-serangannya pada Lebanon, pelanggaran-pelanggarannya terhadap hak-hak azasi manusia bangsa Palestina dalam pendudukan, pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Ke-Empat, klaimnya atas Jerusalem yang bersatu sebagai ibukotanya, hubungannya dengan Afrika selatan, dan program nuklirnya. Akan tetapi karena peraturan-peraturan Dewan PBB, semua resolusi semacam itu harus menerima persetujuan terbuka dari Amerika Serikat atau persetujuan diam-

¹⁰ Machnun Husein. 1999. *Prospek Perdamaian di Timur Tengah (Sebuah Tilikan Latar Belakang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hlm. 55

¹¹ *ibid.* Hlm. 200. Diakses di *Google Zinnia Jurnal*. Terjemahan oleh: Rahmani Astuti

diamnya melalui suara abstain dalam pemungutan suara. Amerika Serikat sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, mempunyai hak untuk memveto setiap resolusi yang diajukan kepada Dewan.¹²

Dari catatan yang ada, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) resolusi yang menimpakan kesalahan pada negara Yahudi ini. Dari mulai seruan-seruan lunak yang mendesak Israel agar mengambil atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu sampai pesan-pesan yang lebih tajam yang menuntut tindakan dan dengan keras mengecam tindakannya. Dan Amerika Serikat telah memveto sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) diantaranya guna melindungi kepentingan Israel, dan resolusi sisanya atas kolusi Amerika Serikat dan Israel, PBB tidak pernah dapat merealisasikan resolusi-resolusi tersebut.¹³

Dari beberapa uraian di atas terbukti bahwa teori-teori yang dikemukakan baik oleh K. J. Holsti, maupun Theodore A Coulumbis dan James H Wolfe membuktikan bahwa Amerika Serikat seringkali menggunakan kekuatan-kekuatannya baik secara terang-terangan pada saat-saat diplomasi (pada sidang-sidang PBB) maupun secara diam-diam (dengan cara diam-diam memberi bantuan-bantuan baik berbentuk pendanaan maupun bantuan peralatan militer). Selain itu, contohnya: negara Israel karena merasa mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, sering melakukan “manuver-manuver” baik politis maupun militer terhadap negara-negara Arab. Hal

menyelesaikan konflik-konflik Internasional, khususnya konflik yang terjadi di jazirah Arab, misalnya konflik antara Arab-Israel.¹⁴

F. Hipotesa

Ketidakberhasilan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina disebabkan karena besarnya peran Amerika di organisasi tersebut sehingga menghambat fungsi utama PBB.

G. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema dan melihat permasalahan yang ada, maka pembahasan skripsi ini difokuskan pada kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Israel Palestina.

Fokus kajian akan ditekankan pada periode 1993 yang merupakan babak baru dari konflik Israel Palestina setelah konflik Arab Israel sampai tahun 2003 yang merupakan tahun keluarnya inisiatif damai Geneva sebagai pendukung peta perdamaian.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa kualitatif, dalam
... mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka dari berbagai

sumber tertulis seperti buku, majalah, makalah, surat kabar, jurnal berita, internet dan catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan fasilitas perpustakaan, sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab. Secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi pendahuluan, yang diawali dengan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: menjelaskan mengenai deskripsi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, organ-organnya termasuk Dewan Keamanan, prosedur penggunaan hak veto dan pemungutan suara di PBB. Efektivitas Dewan Keamanan serta membahas peran PBB dalam upaya penyelesaian konflik internasional.

Bab III : menjelaskan mengenai gambaran umum negara Israel dan Palestina. Latar belakang konflik Israel-Palestina serta membahas mengenai upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-

Bab IV : menjelaskan mengenai sebab-sebab ketidakberhasilan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, yaitu hubungan Israel dan Amerika, tekanan AS di PBB, serta ketidakseimbangan kekuasaan di tubuh PBB.

Bab V : berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya